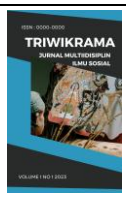
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 7 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



POLITIK IDENTITAS DAN AGAMA DALAM KONTEKS PEMERINTAHAN DI ASIA TENGGARA : STUDI KASUS SINGAPURA

Luthfiyyah Annisa Pramita, Amanda Putri Handriyanti, Rafa Thahirah, Puput Aurelia
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan

ARTICLE INFO

Article history:
Received Oktober 2025
Revised Oktober 2025
Accepted Oktober 2025
Available online Oktober 2025

Email:
6670230159@untirta.ac.id,
6670230081@untirta.ac.id,
6670230073@untirta.ac.id,
6670230034@untirta.ac.id

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2025 by Author..

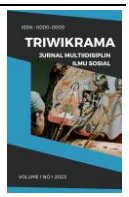
Abstrak

Artikel ini mengkaji hubungan antara politik identitas dan agama dalam konteks pemerintahan di Asia Tenggara dengan studi kasus Singapura sebagai fokus utama. Politik identitas di kawasan ini menjadi fenomena penting karena keterkaitannya dengan etnisitas, agama, dan legitimasi kekuasaan dalam sistem politik modern. Agama tidak hanya berperan sebagai panduan spiritual, tetapi juga sebagai simbol sosial dan alat mobilisasi politik yang memengaruhi proses pembentukan kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode analisis literatur terhadap sejumlah sumber ilmiah yang membahas relasi agama, negara, dan identitas di Asia Tenggara. Hasil kajian menunjukkan bahwa Singapura menerapkan model *sekularisme pragmatis*, yaitu sistem yang tidak sepenuhnya memisahkan agama dari negara, tetapi mengaturnya secara ketat agar tidak menjadi sumber konflik sosial. Melalui kebijakan seperti *Maintenance of Religious Harmony Act* dan model *CMIO* (Chinese-Malay-Indian-Others), pemerintah berhasil mempertahankan stabilitas sosial dan harmoni antaragama dalam masyarakat multietnis. Kontrol negara yang kuat terhadap ekspresi keagamaan menimbulkan tantangan baru terkait kebebasan beragama dan representasi kelompok minoritas. Temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan politik identitas berbasis agama di Asia Tenggara memerlukan keseimbangan antara stabilitas nasional, inklusivitas sosial, dan pengakuan terhadap keberagaman identitas.
Kata kunci: Politik identitas, agama, pemerintahan, Asia Tenggara, Singapura, sekularisme pragmatis, multikulturalisme.

Abstract

This article explores the relationship between identity politics and religion within the governance context of Southeast Asia, focusing on Singapore as a case study. Identity politics in the region has become a crucial phenomenon as it intertwines with ethnicity, religion, and the legitimacy of political power in modern governance. Religion functions not only as a spiritual guide but also as a social symbol and a political mobilization tool that influences policy formation. This study employs a qualitative descriptive approach through literature analysis of academic sources discussing the interplay between religion, the state, and identity in Southeast Asia. Findings reveal that Singapore applies a pragmatic secularism model a system that does not completely separate religion from the state but regulates it to prevent social conflict. Through policies such as the Maintenance of Religious Harmony Act and the CMIO (Chinese-Malay-Indian-Others) model, the government maintains social stability and interreligious harmony within its multiethnic society. Nevertheless, the strong state control over religious expression presents challenges concerning religious freedom and minority representation. The study concludes that managing religion-based identity politics in Southeast Asia requires balancing national stability, social inclusivity, and the recognition of plural identities.
***Keywords**: Identity politics, religion, governance, Southeast Asia, Singapore, pragmatic secularism, multiculturalism.*

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 7 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



PENDAHULUAN

Fenomena politik identitas menjadi salah satu isu paling krusial dalam dinamika politik kontemporer di Asia Tenggara. Politik identitas, menurut Ali (2019), merupakan bentuk mobilisasi politik yang didasarkan pada kesamaan identitas etnis, agama, ras, atau kelompok sosial tertentu yang digunakan sebagai dasar perjuangan politik, baik untuk memperoleh kekuasaan maupun pengakuan. Politik identitas tidak hanya terkait dengan perebutan kekuasaan politik di era modern, tetapi juga mencakup upaya kelompok tertentu untuk mempertahankan eksistensi, memperjuangkan hak-hak sosial, dan membangun legitimasi moral dalam masyarakat yang pluralistik. Fenomena ini dapat memperkuat solidaritas kelompok, namun di sisi lain dapat pula menjadi sumber perpecahan sosial jika tidak dikelola dengan baik oleh negara.

Rahman et al. (2020)menegaskan bahwa politik identitas berakar pada dimensi sosial agama yang kompleks. Agama tidak hanya berperan sebagai sistem keyakinan, tetapi juga sebagai penanda sosial dan simbol identitas kolektif yang mampu mempengaruhi dinamika politik. Agama sering menjadi bagian dari konstruksi sosial yang membentuk orientasi politik masyarakat dalam masyarakat multikultural seperti Asia Tenggara. Hubungan antara agama dan politik identitas tidak dapat dipisahkan dalam kerangka ini karena keduanya saling memperkuat. Ketika agama dijadikan dasar bagi mobilisasi politik, maka nilai-nilai keagamaan sering kali ditafsirkan ulang sesuai kepentingan kelompok.

Politik identitas berbasis agama berkembang dengan corak dan tantangan yang berbeda-beda di tiap negara jika dilihat dari kacamata kawasan Asia Tenggara. Relasi antara agama, konflik, dan kebijakan publik di Asia Tenggara sering kali bersumber dari ketegangan antara komunitas mayoritas dan minoritas (Kusuma, 2016). Negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Myanmar menunjukkan bagaimana agama dapat menjadi sumber legitimasi politik sekaligus potensi konflik sosial. Idi (2018) menambahkan bahwa konflik etno-religius di Asia Tenggara tidak hanya berakar pada perbedaan doktrin agama, tetapi juga pada ketimpangan sosial-ekonomi serta warisan kolonial yang membentuk hierarki identitas etnis dan agama.

Susanto (2016) menjelaskan bahwa kolonialisme berperan besar dalam pembentukan identitas kebangsaan di Asia Tenggara. Warisan kolonial tidak hanya meninggalkan batas-batas politik baru, tetapi juga menciptakan stratifikasi sosial berdasarkan ras, agama, dan etnis. Setelah kemerdekaan, negara-negara di Asia Tenggara berusaha membangun identitas nasional yang menyatukan keberagaman tersebut. Di tengah upaya itu, muncul pula tantangan baru tentang bagaimana negara menjaga keseimbangan antara pengakuan identitas agama dan etnis dengan tuntutan kesetaraan dalam kehidupan bernegara.

Dalam perspektif kontemporer, Jegalus (2024) menyatakan bahwa politik identitas agama dalam demokrasi modern menghadirkan dilema post-sekuler: negara tidak lagi dapat bersikap sepenuhnya netral terhadap agama, karena agama tetap menjadi sumber moral dan makna bagi masyarakat. Hal ini terlihat jelas di negara-negara mayoritas Muslim seperti Indonesia, di mana identitas agama masih menjadi faktor utama dalam mobilisasi politik (Utama & Tanasyah, 2023; Wati, 2021). Disisi lain negara seperti Singapura memilih pendekatan berbeda dengan menerapkan sekularisme pragmatis yang ketat untuk menjaga stabilitas sosial di tengah keragaman agama dan etnis yang tinggi.

Singapura, sebagai negara kecil dengan populasi multietnis yang terdiri atas etnis Cina (sekitar 74%), Melayu (13%), India (9%), dan lain-lain ini menjadi contoh menarik dalam mengelola politik identitas dan agama dalam pemerintahan. Negara ini sering dijadikan model keberhasilan dalam menjaga harmoni sosial melalui kebijakan multikulturalisme dan meritokrasi. Tetapi menurut Dwijayanti (2018) realitas sosial politik Singapura tidak sepenuhnya bebas dari politik identitas. Dalam pemilihan presiden tahun 2017, misalnya, muncul fenomena "*kontestasi triple minority*" pada diri Halimah Yacob, seorang Muslimah

keturunan India yang menjadi Presiden perempuan pertama Singapura. Kasus ini menunjukkan bagaimana identitas etnis, agama, dan gender dapat berinteraksi secara kompleks dalam arena politik negara sekuler (Rasyid et al., 2020).

Pendekatan pragmatis Singapura terhadap agama sering disebut sebagai "sekularisme positif" bukan pemisahan total antara agama dan negara, melainkan pengaturan yang memastikan agama tidak digunakan sebagai alat politik Widiyanta (2015). Pemerintah Singapura secara aktif membatasi ruang politik identitas berbasis agama dan ras, dengan alasan menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Negara menerapkan regulasi ketat terhadap kegiatan keagamaan untuk memastikan bahwa agama tidak menjadi sumber perpecahan. Strategi ini secara efektif menekan potensi konflik agama, namun sekaligus memunculkan kritik mengenai keterbatasan kebebasan ekspresi keagamaan.

KERANGKA TEORITIS

1. Politik Identitas dan Agama

Politik identitas merupakan konsep yang menjelaskan bagaimana kelompok sosial menggunakan unsur identitas tertentu seperti agama, etnis, bahasa, atau budaya untuk memperjuangkan kepentingan politiknya. Menurut Ali (2019), politik identitas agama muncul ketika simbol-simbol keagamaan tidak hanya berfungsi sebagai pedoman spiritual, tetapi juga dijadikan alat untuk membentuk posisi sosial dan politik. Artinya, agama tidak lagi sekadar keyakinan pribadi, melainkan menjadi dasar pembentukan identitas kelompok dalam masyarakat dan arena politik.

Dalam konteks ini, Wati (2021) menambahkan bahwa menguatnya politik identitas di Indonesia terjadi karena adanya keterkaitan antara faktor agama, sosial, dan etnis. Identitas yang tadinya bersifat kultural berubah menjadi instrumen politik untuk memperoleh legitimasi atau pengaruh. Rahman et al. (2020) menegaskan bahwa agama dan politik identitas saling berhubungan karena keduanya sama-sama berfungsi membangun solidaritas sosial. Agama memberi legitimasi moral, sedangkan identitas kelompok memberikan rasa memiliki yang kuat terhadap suatu komunitas. Ketika dua hal ini digabungkan, muncullah gerakan politik berbasis agama yang dapat memengaruhi kebijakan publik dan arah pemerintahan (Prasetyo et al., 2023).

Kusuma (2016)menjelaskan bahwa di Asia Tenggara, politik identitas berbasis agama sering kali berkaitan dengan isu radikalisme, konflik sosial, dan kebijakan pemerintah terhadap kelompok minoritas. Negara-negara di kawasan ini memiliki sejarah panjang kolonialisme dan pluralitas agama yang tinggi, sehingga interaksi antara kelompok mayoritas dan minoritas sering menimbulkan ketegangan. Politik identitas menjadi ruang perjuangan bagi kelompok yang merasa termarginalkan untuk mendapatkan pengakuan, tetapi di sisi lain juga bisa menjadi ancaman bagi kerukunan sosial jika dimanfaatkan untuk kepentingan politik sempit. Maka dari itu, politik identitas agama tidak selalu negatif, tetapi perlu dikelola secara bijak agar tidak menimbulkan polarisasi sosial dan konflik horizontal.

2. Asia Tenggara

Kawasan Asia Tenggara memiliki ciri khas tersendiri dalam relasi antara agama, identitas, dan negara. Keberagaman agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan kepercayaan lokal berpadu dengan pluralitas etnis dan warisan kolonial yang membentuk pola hubungan sosial-politik yang kompleks. Susanto (2016)menjelaskan bahwa politik di Asia Tenggara tidak dapat dilepaskan dari konstruksi identitas nasional yang sering kali dipengaruhi oleh sejarah kolonial. Di banyak negara, identitas agama menjadi salah satu faktor utama dalam membangun legitimasi kekuasaan dan solidaritas nasional.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 7 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Suaedy (2015) menyoroti bagaimana Islam, identitas, dan minoritas di Asia Tenggara memainkan peran penting dalam relasi mayoritas-minoritas. Di Indonesia, Malaysia, dan Brunei, misalnya, Islam sering menjadi bagian dari identitas nasional, sementara di Thailand atau Filipina, minoritas Muslim justru menjadi kelompok yang berjuang untuk pengakuan dan keadilan sosial. Andriasanti & No (2016)meneliti kontestasi identitas Islam moderat di Asia Tenggara yang memperlihatkan adanya upaya penyesuaian antara nilai-nilai keagamaan dengan demokrasi modern dan pluralisme.

Idi (2018) menyebut bahwa konflik etno-religius di Asia Tenggara sering berakar pada perebutan identitas dan legitimasi politik. Dalam beberapa kasus, agama dijadikan simbol perjuangan sosial melawan ketimpangan ekonomi atau dominasi etnis tertentu. Sementara itu, Wantini et al. (2025)menjelaskan bahwa perkembangan peradaban Islam di Asia Tenggara menunjukkan adanya adaptasi yang kuat terhadap budaya lokal, menjadikan Islam di kawasan ini relatif moderat dibandingkan kawasan lain. Peran komunitas Tionghoa dalam ekonomi Asia Tenggara sebagai bagian dari identitas sosial yang turut membentuk relasi politik lintas etnis (Widiyanta, 2015).

3. Negara, Pemerintahan, dan Agama

Hubungan antara negara dan agama dalam konteks pemerintahan di Asia Tenggara memperlihatkan dinamika yang beragam. Secara umum, pemerintah di kawasan ini berusaha menata relasi agama agar tidak menimbulkan konflik dan menjaga stabilitas nasional. Jegalus (2024)dalam kajiannya mengenai "*identity politics and religious recognition in Indonesian democracy*" menekankan bahwa pengakuan terhadap identitas keagamaan merupakan bagian penting dari demokrasi pasca-sekuler. Munandar (2025) Negara tidak bisa sepenuhnya memisahkan agama dari ruang publik, karena agama tetap memiliki fungsi sosial dan moral yang kuat di masyarakat.

Aji (2022) menambahkan bahwa di Asia Tenggara, praktik moderasi beragama menjadi strategi politik penting untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dan kepentingan nasional. Pemerintah berperan dalam mengatur kebijakan publik yang sensitif terhadap isu agama, seperti pendidikan, pernikahan, atau hak minoritas. Di Indonesia misalnya, negara mengakui enam agama resmi dan menjamin kebebasan beribadah, namun juga memiliki kewenangan mengatur ekspresi keagamaan agar tidak menimbulkan ketegangan sosial.

Dalam tataran teori, negara berfungsi sebagai penengah antara berbagai kepentingan identitas (Febriansyah et al., 2024). Ia harus menjaga agar agama tidak dimonopoli oleh kelompok tertentu, tetapi juga tidak diabaikan dalam kehidupan publik. Menurut Abimanyu (2025) Hubungan ini mencerminkan model "negara multikultural" yang mencoba menyeimbangkan antara pengakuan terhadap perbedaan dan upaya menciptakan kesatuan nasional.

Bentuk ideal dari tata pemerintahan di Asia Tenggara adalah yang mampu memadukan nilai-nilai agama dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia (Kusuma, 2016). Dalam hal ini, peran agama tidak dihapuskan, tetapi ditempatkan secara proporsional. Dengan demikian, teori hubungan negara-agama menekankan pentingnya keseimbangan antara legitimasi politik, pluralisme sosial, dan stabilitas pemerintahan. Negara yang gagal mengelola isu identitas dan agama berpotensi menghadapi disintegrasi sosial dan krisis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan (Khoirunnisa, 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak melakukan pengumpulan data lapangan, melainkan berfokus pada analisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik politik identitas dan agama dalam konteks pemerintahan di Asia Tenggara, khususnya di

Singapura. Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif bertujuan memahami makna di balik suatu fenomena sosial melalui penelusuran terhadap pengalaman, teks, dan konteks yang melatarinya. Pendekatan ini bersifat interpretatif, yaitu berusaha menggali pemahaman mendalam terhadap bagaimana identitas dan agama dikelola oleh negara dalam ruang politik dan kebijakan publik. Karena itu, metode ini dianggap paling sesuai untuk menelaah peran agama dalam politik identitas tanpa menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat angka atau statistik.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini seluruhnya merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur ilmiah seperti buku, jurnal penelitian, artikel akademik, laporan kebijakan, serta dokumen resmi pemerintah Singapura seperti Maintenance of Religious Harmony Act dan model Chinese-Malay-Indian-Others (CMIO). Sumber-sumber tersebut dipilih secara purposif, yaitu berdasarkan relevansi dengan isu politik identitas, agama, dan tata kelola pemerintahan multikultural. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik analisis isi (content analysis) yang dijelaskan oleh Creswell & Poth (2016).

Analisis dilakukan melalui beberapa tahap yaitu dengan membaca seluruh data, mengelompokkan tema-tema utama, menafsirkan makna dari setiap tema, lalu menarik kesimpulan secara logis dan sistematis. Proses ini menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana Singapura mengelola politik identitas berbasis agama melalui kebijakan sekularisme pragmatis dan multikulturalisme. Dengan metode ini lah penelitian dapat menjelaskan hubungan antara agama dan identitas dalam politik secara mendalam, rasional, dan sistematis berdasarkan temuan-temuan ilmiah yang telah dipublikasikan sebelumnya.

PEMBAHASAN

Singapura merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang dikenal dengan stabilitas politik dan keberhasilannya dalam mengelola keberagaman identitas etnis maupun agama. Sebagai negara kota yang berpenduduk lebih dari lima juta jiwa, Singapura memiliki komposisi masyarakat yang sangat plural: etnis Tionghoa sekitar 75%, Melayu 15%, India 7%, dan sisanya komunitas lain seperti Eurasia dan pendatang asing. Secara agama, masyarakatnya juga beragam—terdapat penganut Buddha, Islam, Kristen, Hindu, serta Taoisme yang hidup berdampingan di ruang sosial yang sama (Suaedy, 2015). Keberagaman ini menjadikan Singapura sebagai laboratorium sosial bagi kajian tentang politik identitas dan pengelolaan hubungan antaragama dalam konteks pemerintahan modern.

Menurut Susanto (2016), pluralitas etnis dan agama di Singapura tidak hanya menjadi realitas sosial, tetapi juga fondasi penting bagi pembentukan kebijakan publik negara. Pemerintah Singapura sejak awal kemerdekaannya di bawah kepemimpinan Lee Kuan Yew membangun prinsip dasar bahwa keberagaman harus dikelola secara rasional dan terlembaga agar tidak menimbulkan konflik sosial. Hal ini terlihat dalam kebijakan CMIO model (Chinese-Malay-Indian-Others), yang menjadi kerangka resmi klasifikasi etnis di Singapura. Model ini bukan sekadar kategori demografis, tetapi juga alat politik identitas yang digunakan untuk menjaga keseimbangan representasi etnis dalam bidang pendidikan, perumahan, hingga politik (Kusuma, 2016).

Pemerintah Singapura menerapkan prinsip “harmoni antaragama” melalui regulasi ketat namun inklusif di bidang agama. Seperti dijelaskan oleh Jegalus (2024), negara Singapura memandang agama sebagai elemen sosial yang perlu diatur agar tidak menjadi sumber konflik. Pemerintah membentuk Maintenance of Religious Harmony Act (MRHA) pada tahun 1990, yang memberikan wewenang kepada negara untuk menegur, membatasi, atau menindak tokoh agama yang dinilai menghasut kebencian antaragama atau berpolitik atas nama agama. Kebijakan ini menunjukkan bahwa Singapura menganut model sekularisme pragmatis bukan

dengan menghapus agama dari ruang publik, tetapi dengan mengontrol ekspresi keagamaan agar tidak menimbulkan polarisasi.

(Aji, 2022) menjelaskan bahwa Singapura berhasil membangun konsep "multikulturalisme negara" yang kuat, di mana identitas etnis dan agama diakui secara legal tetapi ditempatkan dalam kerangka kepentingan nasional dalam politik identitas. Hal ini berbeda dengan model Indonesia yang lebih menekankan pluralisme berbasis nilai-nilai Pancasila. Multikulturalisme Singapura menempatkan negara sebagai pengatur utama relasi antaridentitas. Negara hadir sebagai mediator yang menentukan batas ekspresi agama dan etnis dalam ruang publik, termasuk melalui kebijakan housing quota system untuk memastikan tiap blok perumahan dihuni oleh campuran etnis yang seimbang. Kebijakan ini secara efektif mencegah terbentuknya kantong-kantong eksklusif berbasis agama atau ras yang berpotensi menimbulkan segregasi sosial (Ali, 2019).

Wati (2021) menilai bahwa keberhasilan Singapura dalam mengendalikan politik identitas terletak pada keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan kolektif. Pemerintah mengakui hak beribadah dan kebebasan beragama, namun dalam batas yang tidak mengganggu harmoni sosial. Pendekatan ini sering disebut sebagai "communitarian democracy" demokrasi berbasis komunitas yang menekankan tanggung jawab sosial warga terhadap stabilitas bersama, bukan hanya hak-hak individu. Model ini memungkinkan negara menjaga kohesi sosial tanpa menekan ekspresi identitas keagamaan warga.

Beberapa penelitian menyoroti sisi kritis dari kebijakan tersebut. Rahman et al. (2020) mencatat bahwa pengaturan ketat terhadap ekspresi agama juga berpotensi membatasi kebebasan sipil dan menghambat perkembangan wacana keagamaan yang lebih dinamis. Namun, dari perspektif stabilitas politik, pendekatan ini terbukti efektif dalam mencegah konflik etno-religius sebagaimana terjadi di negara Asia Tenggara lain. Singapura tidak banyak mengalami benturan antaragama besar karena negara secara aktif memfasilitasi dialog lintas keyakinan melalui lembaga seperti Inter-Religious Organisation (IRO) yang dibentuk sejak 1949.

Maka dari itu politik identitas dan agama di Singapura menunjukkan bentuk hubungan yang unik: agama tetap hadir dalam kehidupan publik, tetapi diatur dalam kerangka hukum dan kebijakan negara. Pemerintahan Singapura menjadikan pengelolaan identitas sebagai bagian integral dari tata kelola nasional yang efisien, berorientasi stabilitas, dan berakar pada prinsip kesetaraan antarwarga. Dalam konteks teori yang telah dibahas sebelumnya, Singapura dapat dipandang sebagai model keberhasilan negara modern dalam menata relasi antara identitas, agama, dan kekuasaan melalui strategi politik yang terukur dan institusional.

PENUTUP

Artikel ini telah membahas bagaimana politik identitas dan agama berinteraksi dalam konteks pemerintahan di Asia Tenggara, dengan studi kasus Singapura. Singapura menunjukkan model di mana negara mengambil pendekatan pragmatis terhadap agama dan identitas: mensosialisasikan multikulturalisme dan meritokrasi, mengatur pemisahan antara agama dan politik, sambil memberikan ruang terbatas bagi identitas keagamaan/etnis untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Strategi ini juga memiliki tantangan mengingat adanya tekanan bagi kelompok minoritas untuk menegosiasikan identitas mereka dalam kerangka nasional yang sangat dijaga.

Bagi negara-negara Asia Tenggara lainnya, pelajaran dari Singapura menjadi referensi bahwa pengelolaan politik identitas berbasis agama/ras memang penting untuk stabilitas nasional, namun perlu diseimbangkan dengan pengakuan terhadap pluralitas, inklusi sosial, dan hak identitas individual ataupun kelompok. Saya menyarankan agar penelitian selanjutnya memperluas ke mekanisme konkret birokrasi, peran organisasi keagamaan/etnis, dan

bagaimana aktor-non-negara (misalnya organisasi keagamaan, guru agama, ulama) memengaruhi atau dinegosiasikan dalam ruang publik pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

Abimanyu, A. D. (2025). BUDDHIST-NATIONALISM DAN PARADOKS PEMBENTUKAN IDENTITAS MULTIKULTURAL DI MYANMAR, THAILAND DAN KAMBOJA. *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional*, *4*(2), 101–113.

Aji, G. B. (2022). ISLAM, POLITICS AND DEMOCRACY IN SOUTHEAST ASIA: AN INITIAL OBSERVATION OF THE CONTEXT AND PRACTICE OF RELIGIOUS MODERATION. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, *24*(3), 303–317.

Ali, S. (2019). Politik Identitas Agama (Studi kasus politisasi agama pada pemilihan Bupati Morotai 2011). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *6*. https://doi.org/10.5281/zenodo.3626733

Andriasanti, L., & No, J. A. P. I. (2016). Kontestasi Identitas Islam Moderat di Asia Tenggara. *Journal International & Diplomacy*, *2*(1).

Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications. https://books.google.co.id/books?id=4uB76IC_pOQC

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. SAGE Publications. https://books.google.co.id/books?id=DLbBDQAAQBAJ

Dwijayanti, R. (2018). KONTESTASI TRIPLE MINORITY PADA DIRI HALIMAH YACOB PADA PEMILIHAN PRESIDEN SINGAPURA TAHUN 2017 DITINJAU DARI PRESPEKTIF POLITIK IDENTITAS. *Doctoral Dissertation, Universitas Airlangga*. https://www.youtube.com/watch?v=Ct1vDnqatWk

Febriansyah, B. A., Manando, I., & Kusuma, A. W. (2024). Politik Identitas Di Indonesia: Antara Nasionalisme Dan Agama. *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, *7*(1), 60–72.

Idi, A. (2018). *Konflik Etno Religius di Asia Tenggara*. LKIS PELANGI AKSARA. https://books.google.co.id/books?id=zLNVDwAAQBAJ

Jegalus, N. (2024). Identity Politics and Religious Recognition in Indonesian Democracy: A Post-Secular Perspective. *Jurnal Dakwah Dan Sosial*, *7*(2). https://doi.org/10.37680/muharrik.v7i2.7086

Khoirunnisa, K. (2023). Pemilu Dan Politik Identitas: Dilema Antara Kebangsaan Dan Keagamaan. *Jurnal Polinter: Kajian Politik Dan Hubungan Internasional*, *9*(1), 36–54.

Kusuma, B. M. (2016). RADIKALISME DI ASIA TENGGARA: Dinamika Relasi Agama, Konflik, dan Kebijakan Publik. *Institusional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*. https://doi.org/http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/27185

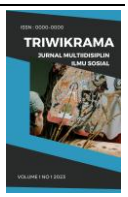
Munandar, A. (2025). REPOSISI GERAKAN ISLAM MODERN DI TENGAH PERUBAHAN SOSIAL DAN POLITIK DI ASIA TENGGARA. *JISIP UNJA*, *0*.

Prasetyo, H., Rosa, D. V., & Sari, R. (2023). Beradab dengan adat: Politik identitas dalam ritualitas agama masyarakat Tengger. *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS)*, *1*(2), 124–130.

Rahman, M. T., Rosyad, R., Setiawan, A. I., & Rasyidin, K. (2020). *Agama dan Politik Identitas dalam Kerangka Sosial*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung. https://books.google.co.id/books?id=CoNaEAAAQBAJ

Rasyid, F. A., Fathonih, A., Anwar, S., & Rusyana, A. Y. (2020). *Kontestasi Agama dan Negara: Politik Hukum Penodaan Agama di Asia Tenggara*. LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung. https://books.google.co.id/books?id=GGfjDwAAQBAJ

Suaedy, A. (2015). Islam Identitas dan Minoritas di Asia Tenggara. *Academia*, *1*.



Susanto, H. (2016). Kolonialisme dan Identitas Kebangsaan Negara-negara Asia Tenggara. *Jurnal Sejarah Dan Budaya*, *10*(2), 144–155.

Utama, S. B., & Tanasyah, Y. (2023). The impact of identity politics on democracy and religious system in Indonesia. *KURIOS (Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama..., 9 (3), 661673*.

Wantini, T., Ramadhani, N. A., Purba, C. Z. D. P. B., Dimansyah, A., Kartika, A. D., Suherman, R., & Fuadi, S. (2025). Peradaban Islam di Asia Tenggara. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, *3*(4), 1–9.

Wati, W. (2021). MENGUATNYA POLITIK IDENTITAS DI INDONESIA BAIK KARENA FAKTOR AGAMA, SOSIAL, DAN ETNIS. *Jurnal Pendidikan PKN Pendidikan Dan Kewarganegaraan*, *2*. https://doi.org/https://doi.org/10.26418/jppkn.v2i2.44627

Widiyanta, D. (2015). *Etnis Cina dan Perekonomian Asia Tenggara 84 KEBERADAAN ETNIS CINA DAN PENGARUHNYA DALAM PEREKONOMIAN DI ASIA TENGGARA*. https://doi.org/https://doi.org/10.21831/moz.v5i1.4341